

Buletin Ilmiah

Marina

Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

MARINA	Vol. 11	No. 1	Hal: 1 - 84	Jakarta, Juni 2025	ISSN: 2502-0803
--------	---------	-------	-------------	--------------------	-----------------

Buletin Ilmiah "MARINA"

Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

VOLUME 11 NO. 1 JUNI 2025

Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan adalah Buletin Ilmiah yang diterbitkan oleh Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, dengan tujuan menyebarluaskan hasil karya tulis ilmiah di bidang Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan.

Penerbit:

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
(BBRSEKP)

bekerjasama dengan

Indonesian Marine and Fisheries Socio-Economics Research Network
(IMFISERN)

Penanggung Jawab:

Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Dewan Redaksi :

Ketua:

Achmad Zamroni, Ph.D. (*Pengelolaan Wilayah Pesisir*)

Anggota:

Dr. Budi Wardono (*Sistem Usaha Pemasaran dan Perikanan*)

Dr. Yesi Dewita Sari (*Sistem Usaha Perikanan*)

Dr. Ahmad Tarmiji Alkhudri (*Sosiologi*)

Dr. Hertria Maharani Putri, S. Sos., M.B.A (*Perencanaan Wilayah*)

Akhmad Solihin, S.Pi., M.H. (*Hukum dan Kebijakan*)

Estu sri Luhur, M.Si (*Ilmu Ekonomi*)

Nensyana Shafitri, M. Si (*Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan*)

Riesti Triyanti, M.Ling (*Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan*)

Redaksi Pelaksana :

Heny Lestari, S.E

Lathifatul Rosyidah, M.Si

Cornelia Mirwantini Witomo, M.Ling

Christina Yuliati, M. Si

Radityo Pramoda, SH., SE., MM

Nurhendra, S.Kom

Ilham Ferbiansyah, S.Kom

Eva Octaviani Cesyuria, S.IK

Titin Hasanah, S.E

Alfi Fadillah Aisyah Sari, S.E

Alamat Redaksi:

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Gedung BPPSDM KP 2 Lt. 2 - Jalan Pasir Putih Nomor I Ancol Timur, Jakarta Utara

Telp. (021) 6471 1583, Faks. (021) 64700924

Jurnal Online: <http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/mra>

Email: marina.rosek@gmail.com

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, kami panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas terbitnya Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Volume 11 Nomor 1 tahun 2025 ini. Buletin ini merupakan perubahan dari penerbitan Warta Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan yang sebelumnya telah dipublikasikan mulai dari Volume 1 tahun 2006 sampai Volume 9 tahun 2014. Perbaikan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas tulisan yang dimuat serta penyesuaian terhadap pedoman akreditasi majalah ilmiah dari LIPI. Perbaikan dilakukan kembali mulai Volume 4 Nomor 1 tahun 2018 sampai dengan Volume 5 Nomor 1 tahun 2019 dan Buletin Ilmiah “Marina” Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan mendapatkan Akreditasi SINTA 3 mulai Volume 4 Nomor 2 tahun 2018. Selanjutnya, proses reakreditasi dilakukan pada tahun 2019 dan mendapatkan akreditasi SINTA 2 mulai Vol. 5 No 1 tahun 2019.

Judul artikel ilmiah yang dimuat pada Buletin Ilmiah “Marina” Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Volume 11 Nomor 1 tahun 2025 terdiri dari; (i) Nilai Manfaat Langsung Ekosistem Mangrove Untuk Budi Daya Ikan Berbasis Tambak di Kabupaten Tana Tidung; (ii) Persepsi Stakeholder Terhadap Dampak Penetapan Kelembagaan Konservasi Penyu Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat; (iii) Dampak Ekonomi Ekowisata Mangrove Bagi Masyarakat Lokal di Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat; (iv) Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Pemerintah Provinsi Dalam Pengawasan Perikanan dan Pelaksanannya; (v) Analisis Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan Pada Komunitas Nelayan Gillnet di Pesisir Karangsang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat; (vi) Hubungan Pembiayaan Berkelanjutan dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan Dalam Pengembangan Wisata Bahari, dan; (vii) Determinan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Nelayan di Desa Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Kakap. Artikel-artikel tersebut diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pelaku usaha dan pengambil kebijakan di sektor kelautan dan perikanan terutama dari sisi sosial ekonomi.

Redaksi berharap semoga seluruh informasi yang disajikan dapat bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca. Kami selaku redaksi mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca untuk penyempurnaan penerbitan buletin berikutnya.

Selamat membaca dan terima kasih

Redaksi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dewan Redaksi Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BIMSEKP) menyampaikan penghargaan dan terima kasih sebesar - besarnya kepada para Mitra Bestari yang telah berpartisipasi dalam menelaah naskah yang diterbitkan di jurnal ilmiah ini, sehingga jurnal ini dapat terbit tepat pada waktunya. Berikut Mitra Bestari yang berpartisipasi dalam terbitan Volume 11 Nomor 1, Juni 2025 adalah:

1. Prof. Dr. Rilus A Kinseng (*Sosiologi Pedesaan Kebijakan - IPB University*)
2. Dr. Ir. Edi Susilo, M.S. (*Sosiologi Perikanan - Universitas Brawijaya*)
3. Maulana Firdaus, Ph.D. (*Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan - Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*)
4. Dr. Irwan Muliawan (*Sistem Usaha Perikanan - Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*)
5. Dr. Subhechanis Saptanto (*Sistem Usaha Perikanan - Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*)
6. Dr. Rizky Muhartono (*Sosial dan Kelembagaan - Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*)
7. Abdul Malik, S.T., M.Si., Ph.D. (*Lingkungan Perairan dan Sumberdaya Perikanan - Universitas Negeri Makassar*)
8. Dr. Zainal Abidin (*Sosiologi Perikanan - Universitas Brawijaya*)
9. Dr. Armen Zulham (*Sistem Usaha Perikanan - Badan Riset dan Inovasi Nasional*)
10. Dr. Benny Osta Nababan, S.Pi, M.Si (*Ekonomi Sumber Daya - IBP University*)
11. Drs. Ary Wahyono, M.Si (*Maritim dan Kenelayanan - Badan Riset dan Inovasi Nasional*)
12. Drs. Masyhuri Imron, MA (*Sosiologi - Badan Riset Inovasi Nasional*)
13. Tenny Apriliani, M.Si. (*Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan - Badan Riset Inovasi Nasional*)
14. Rizki Aprilian Wijaya, S.Pi., M.T (*Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan - Badan Riset Inovasi Nasional*)
15. Hakim Miftakhul Huda, M. Si (*Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan - Badan Riset dan Inovasi Nasional*)
16. Mira, M.Si (*Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan - Badan Riset Inovasi Nasional*)
17. Nendah Kurniasari, M.Si (*Sosiologi - Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*)
18. Risna Yusuf, S.KM., M.Si (*Sistem Usaha Perikanan - Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*)
19. Rismutia Hayu Deswati, M.E. (*Sosial dan Kelembagaan - Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*)
20. Bayu Vita Indah Yanti, S.H. (*Sosial dan Kelembagaan - Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*)

Buletin Ilmiah "MARINA"

Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

VOLUME. 10 NO. 1 JUNI 2024

DAFTAR ISI	Halaman
KATA PENGANTAR	i
UCAPAN TERIMA KASIH	ii
DAFTAR ISI	iii
LEMBAR ABSTRAK	v
Nilai Manfaat Langsung Ekosistem Mangrove Untuk Budi Daya Ikan Berbasis Tambak di Kabupaten Tana Tidung <i>Oleh: Mazlan Mazlan, Fredinan Yulianda, Gatot Yulianto, Dori Rachmawani</i>	1 – 8
Persepsi Stakeholder Terhadap Dampak Penetapan Kelembagaan Konservasi Penyu Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat <i>Oleh: Halimah Dwi Yolanda, Kastana Sapanli, Nuva Nuva</i>	9 – 23
Dampak Ekonomi Ekowisata Mangrove Bagi Masyarakat Lokal di Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat <i>Oleh: Teddy Septiansa, Gatot Yulianto, Kastana Sapanli</i>	25 – 39
Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Pemerintah Provinsi Dalam Pengawasan Perikanan dan Pelaksanannya <i>Oleh: Harlym Raya Maharbhakti, Eko Sri Wiyono, Ronny Irawan Wahju, Mohammad Imron, Domu Simbolon</i>	41 – 50
Analisis Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan Pada Komunitas Nelayan Gillnet di Pesisir Karangsong, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat <i>Oleh: Asep Agus Handaka Suryana, Dede Nishfi Tamamul Lail, Junianto Junianto, Iwang Gumilar</i>	51 – 60
Hubungan Pembiayaan Berkelanjutan dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan Dalam Pengembangan Wisata Bahari <i>Oleh: Embun Prowanta, Indra Siswanti, Mochammad Fahlevi</i>	61 – 71
Determinan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Nelayan di Desa Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Kakap <i>Oleh: Santa Veronika, Eva Dolorosa, Imelda Imelda</i>	73 – 84

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa ijin dan biaya

Nilai Manfaat Langsung Ekosistem Mangrove Untuk Budi Daya Ikan Berbasis Tambak di Kabupaten Tana Tidung
The Direct Use Value of Mangrove Ecosystems for Pond-Based Fish Aquaculture in Tana Tidung Regency

Mazlan Mazlan, Fredinan Yulianda, Gatot Yulianto, Dori Rachmawani

ABSTRAK

Ekosistem mangrove memiliki peran penting dalam keberhasilan peningkatan produksi hasil budidaya di tambak karena memiliki banyak manfaat secara ekologi dan ekonomi sebagai penahan abrasi, penyedia pakan alami dan sebagai rumah bagi sebagian biota yang ada disekitarnya. Penelitian dilakukan di Kabupaten Tana Tidung dengan 31 responden pembudidaya tambak yang dipilih secara purposive. Data diperoleh melalui wawancara dan kuesioner (primer), serta dokumentasi dari instansi terkait (sekunder), dengan sampel ditentukan secara random untuk mewakili populasi petambak di wilayah tersebut. Metode analisis yang digunakan adalah Analisis Nilai Manfaat Langsung dari tambak yang ada disekitar mangrove. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu manfaat langsung dari mangrove di Kabupaten Tana Tidung adalah budidaya tambak dan kepiting bakau yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi, nilai produksi tambak menghasilkan sekitar 108.600 ton pertahunnya dengan nilai rupiah sekitar Rp6.035.900.000 dari dua jenis komoditi yakni ikan bandeng (*Chanos chanos*) dan udang windu (*Panaeus monodon*) dari luasan tambak sekitar 49.310,20 Hektar. Hasil tangkapan sampingan pembudidaya tambak yakni kepiting bakau sebesar Rp102.600.000 pertahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa perikanan budidaya di Kabupaten Tana Tidung memiliki berpotensi ekonomi yang tinggi karena terdapat ekosistem mangrove sebagai penyedia jasa seperti penyedia pakan alami, pencegah abrasi dan tempat perlindungan biota yang memiliki nilai ekonomi, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan perekonomian dibidang perikanan budi daya.

Kata Kunci: nilai manfaat langsung; mangrove; budi daya; tambak; keberlanjutan

ABSTRACT

Mangrove ecosystems play a crucial role in enhancing aquaculture productivity due to their significant ecological and economic functions. They act as natural barriers against coastal abrasion, provide natural feed, and serve as habitats for various aquatic species. This study was conducted in Tana Tidung Regency, involving 31 aquaculture farmers selected purposively. Primary data were obtained through interviews and structured questionnaires, while secondary data were collected from relevant institutions. Sampling was conducted randomly to represent the aquaculture population in the area. The analytical method employed was the Direct Use Value Analysis of aquaculture activities in mangrove-adjacent areas. The results show that one of the direct benefits of mangroves in Tana Tidung is pond-based aquaculture and mangrove crab farming, both of which have high economic value. The annual aquaculture production is approximately 108,600 tons, valued at around IDR6,035,900,000, mainly from two commodities: milkfish (*Chanos chanos*) and giant tiger prawn (*Panaeus monodon*), cultivated across 49,310.20 hectares of ponds. Additionally, the by-catch of mangrove crabs contributes an estimated IDR 102,600,000 annually. These findings highlight the significant economic potential of aquaculture in Tana Tidung Regency, which is strongly supported by the ecosystem services provided by mangroves, including natural feed supply, erosion prevention, and habitat for economically valuable species, thereby enhancing the region's aquaculture-based economy.

Keywords: mangrove ecosystem, aquaculture, benefits value, komodities, Tana Tidung Regency

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa ijin dan biaya

**Persepsi Stakeholder Terhadap Dampak Penetapan Kelembagaan Konservasi Penyu Kota Pariaman
Provinsi Sumatera Barat**

*Stakeholders' Perceptions of the Impact of Establishing the Turtle Conservation Institutional Technical Implementation Unit
in Pariaman City, West Sumatra*

Halimah Dwi Yolanda, Kastana Sapanli, Nuva Nuva

ABSTRAK

Tantangan konservasi penyu seperti perburuan penyu secara liar, rendahnya keterlibatan masyarakat dalam ekowisata, dan perlunya perubahan pola pikir masyarakat terhadap nilai-nilai budaya yang berkaitan dengan penyu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari penetapan kelembagaan yang disebut Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyu di Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dan persepsi stakeholder dan merumuskan kebijakan pengelolaannya agar berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan survei dengan teknik sensus, melibatkan 36 responden yang terdiri dari pelaku usaha, tenaga kerja, dan stakeholder terkait. Penelitian ini menggunakan metode share income untuk mengevaluasi dampak ekonomi, dan analisis kualitatif untuk menilai dampak sosial dan lingkungan dari penetapan Unit Pelaksana Teknis (UPT) konservasi Penyu di Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Penelitian dilaksanakan pada bulan April sampai dengan Mei 2024 di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyu Kota Pariaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPT Konservasi Penyu memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi masyarakat lokal, dengan rata-rata share income yang sangat tinggi. Meskipun demikian, keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan ekowisata masih tergolong rendah, meskipun tingkat konflik dan frekuensi kriminalitas di kawasan ini rendah. Dari segi lingkungan, kualitas udara dan keindahan alam dinilai sangat baik, tetapi masih ada tantangan dalam hal kebersihan dan pengelolaan sampah. Peran stakeholder sangat penting untuk kebijakan yang mendukung keberlanjutan kawasan konservasi yang berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan kawasan konservasi UPT Konservasi Penyu Kota Pariaman.

Kata Kunci: persepsi; stakeholder; konservasi penyu; dampak ekonomi; dampak sosial; dampak lingkungan; ekowisata

ABSTRACT

This study examines key challenges in sea turtle conservation, including illegal hunting, limited community engagement in ecotourism, and the need to shift cultural perceptions surrounding sea turtles. A survey-based approach employing a census technique was used, involving 36 respondents comprising business actors, workers, and relevant stakeholders. The study aims to analyse the economic, social, and environmental impacts of the establishment of the Sea Turtle Conservation Technical Implementation Unit (Unit Pelaksana Teknis/UPT) in Pariaman City, West Sumatra Province. It focuses on stakeholder perceptions and formulates management policies to promote sustainability. The share income method was employed to evaluate economic impact, while qualitative analysis was used to assess social and environmental effects. The research was conducted between April and May 2024 at the UPT Sea Turtle Conservation Centre in Pariaman City. The findings indicate that the UPT significantly contributes to the local economy, with a notably high average share income. However, community participation in ecotourism remains relatively low, despite the area's low levels of conflict and criminal activity. From an environmental perspective, air quality and natural beauty are rated highly, although challenges persist in terms of cleanliness and waste management. The role of stakeholders is pivotal in developing policies that support the sustainability of the conservation area, directly influencing the success of the UPT Sea Turtle Conservation management in Pariaman City.

Keywords: perception; stakeholder; turtle conservation; economic impact; social impact; environmental impact; ecotourism

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa ijin dan biaya

Dampak Ekonomi Ekowisata Mangrove Bagi Masyarakat Lokal di Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat

The Economic Impact of Mangrove Ecotourism in Tarumajaya District, Bekasi, West Java Province

Teddy Septiansa, Gatot Yulianto, Kastana Sapanli

ABSTRAK

Pengembangan ekowisata mangrove di Kecamatan Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat merupakan salah satu upaya pengelolaan kawasan mangrove yang memperhatikan aspek ekologi, ekonomi dan sosial. Penurunan jumlah kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun mengancam keberlanjutan ekowisata. Penelitian dilakukan pada bulan September—Desember 2024 dengan tujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap kondisi, fungsi, dan manfaat ekosistem mangrove serta daya dukung ekowisata dan mengestimasi kontribusi ekonomi ekowisata terhadap pendapatan serta kecukupannya dalam memenuhi pengeluaran rumah tangga pelaku usaha dan tenaga kerja ekowisata. Wawancara dilakukan dengan 56 orang responden yang terdiri dari 52 pelaku usaha perahu wisata dan warung serta empat orang tenaga kerja sebagai petugas tiket. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden memiliki persepsi yang baik terhadap kondisi, fungsi dan pengelolaan ekosistem mangrove melalui pengembangan ekowisata. Kontribusi ekonomi ekowisata bagi pelaku usaha berupa share pendapatan sebesar 44,90% dari total pendapatan, dengan nilai rata-rata pendapatan dari ekowisata sebesar Rp2E157.736,00 pertahun dan hanya memenuhi 49,43% dari pengeluaran rumah tangganya. Sedangkan kontribusi bagi tenaga kerja berupa share pendapatan 69,04% dari nilai rata-rata pendapatan dari sektor wisata senilai Rp18.735.750,00 pertahun, serta dapat memenuhi 78,71% dari pengeluaran rumah tangga. Tingkat persepsi yang baik menjadi faktor pendukung strategi pengembangan ekowisata sehingga dapat mengoptimalkan kontribusi ekonomi bagi masyarakat dengan tetap menjaga prinsip pengelolaan berkelanjutan. Pengelola ekowisata perlu menjadikan kedua ekowisata terpadu dalam satu tata kelola. Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah, Perusahaan Umum Perhutani dan sektor swasta perlu bersinergi untuk membangun kembali ekowisata dengan perbaikan fasilitas, promosi wisata, dan pendampingan pengelolaan.

Kata Kunci: analisis pendapatan; ekowisata; konservasi; mangrove; persepsi

ABSTRACT

The development of mangrove ecotourism in Tarumajaya District, Bekasi, West Java, represents an effort to manage mangrove areas by integrating ecological, economic, and social considerations. However, the continued decline in tourist visits over the years poses a threat to the sustainability of this ecotourism initiative. This study, conducted from September to December 2024, aimed to analyze public perceptions regarding the condition, functions, and benefits of mangrove ecosystems, assess the carrying capacity of the ecotourism site, and estimate the economic contribution of ecotourism to household income, including its adequacy in covering the expenditures of business actors and ecotourism workers. Data were collected through interviews with 56 respondents, comprising 52 boat operators, food stall entrepreneurs, and four individuals working in ticketing. The findings indicate that respondents hold positive perceptions of the condition, function, and management of the mangrove ecosystem through ecotourism development. For business actors, ecotourism contributes an average of 44.90% to their total annual income, amounting to IDR24,157,736.00, although this only covers 49.43% of their household expenditures. For ecotourism workers, the sector contributes 69.04% of their total income, with an average of IDR18,735,750.00 annually, which covers 78.71% of household expenses. The generally favorable public perception serves as a supportive factor in formulating strategies for ecotourism development that enhance economic benefits while upholding sustainable management principles. To strengthen the sustainability and economic impact of ecotourism, integrated governance is essential. Collaboration among Village Governments, Regency, Perhutani (the state forestry company), and the private sector is necessary to revitalize ecotourism through improvements in infrastructure, promotional activities, and management support.

Keywords: income analysis; ecotourism; conservation; mangrove; perception

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa ijin dan biaya

Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Pemerintah Provinsi Dalam Pengawasan Perikanan dan Pelaksanannya

Legal Analysis of Provincial Government Authority In Fisheries Surveillance and Its Implementation

**Harlym Raya Maharbhakti, Eko Sri Wiyono, Ronny Irawan Wahju, Mohammad Imron,
Domu Simbolon**

ABSTRAK

Peran strategis pemerintah provinsi dalam memberantas IUU Fishing di wilayah 12 mil laut masih terhambat oleh kendala sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur pendukung. Studi ini bertujuan untuk menganalisis dinamika pengelolaan perikanan daerah di wilayah pesisir, memahami ketentuan regulatif yang mengatur pengelolaan perikanan oleh pemerintah daerah, serta mengevaluasi pelaksanaan pengawasan perikanan di tingkat provinsi. Penelitian dilakukan pada periode Juli 2024 hingga Maret 2025, dengan metode pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis melalui telaah dokumen kebijakan dan kajian pustaka yang relevan. Analisis terhadap data dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil studi menunjukkan bahwa kerangka regulasi saat ini telah menempatkan pemerintah provinsi sebagai aktor utama dalam pengelolaan perikanan wilayah laut hingga 12 mil laut. Namun, peran strategis ini belum didukung secara optimal oleh ketersediaan sumber daya manusia yang memadai, kecukupan pembiayaan, serta infrastruktur pendukung yang memadai. Dalam konteks kewenangan daerah, terdapat beberapa aspek administratif yang menjadi tanggung jawab provinsi, antara lain penyelenggaraan kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan teritorial hingga 12 mil laut, penerbitan izin usaha penangkapan ikan untuk kapal berukuran lebih dari 5 GT hingga 30 GT, penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dengan kapasitas antara 5 hingga 30 GT, serta pendaftaran kapal perikanan dengan ukuran yang sama. Temuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara mandat regulatif dan kapasitas pelaksanaannya di tingkat daerah.

Kata Kunci: pengawasan perikanan; IUU fishing;
kewenangan pemerintah daerah

ABSTRACT

The strategic role of provincial governments in combating Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing within the 12-nautical-mile territorial sea remains hindered by limitations in human resources, budget allocation, and supporting infrastructure. This study aims to analyse the dynamics of regional fisheries management in coastal areas, understand the regulatory framework governing fisheries management by local governments, and evaluate the implementation of fisheries surveillance at the provincial level. The research was conducted between July 2024 and March 2025, with data systematically collected through a review of relevant policy documents and literature. Data analysis employed both normative and empirical juridical approaches. The findings reveal that the current regulatory framework positions provincial governments as key actors in managing fisheries within the 12-nautical-mile maritime zone. However, this strategic role is yet to be fully supported by adequate human resource capacity, sufficient financial support, and appropriate infrastructure. In terms of regional authority, provincial governments are administratively responsible for several key aspects, including the regulation of fishing activities within territorial waters up to 12 nautical miles, issuing fishing permits for vessels ranging from 5 GT to 30 GT, granting licenses for the procurement of fishing vessels within the same size range, and registering such vessels. These findings highlight a gap between the regulatory mandates assigned to provincial governments and their actual capacity to implement them effectively.

Keywords: fisheries surveillance; IUU fishing; regional government authority

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa ijin dan biaya

Analisis Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan Pada Komunitas Nelayan Gillnet di Pesisir Karangsong, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat

Analysis of Sustainable Livelihood Development of Gillnet Fishermen Community In the Coastal Area of Karangsong, Indramayu Regency, West Java

Asep Agus Handaka Suryana, Dede Nishfi Tamamul Lail, Junianto Junianto, Iwang Gumilar

ABSTRAK

Kesejahteraan nelayan gillnet yang masih rendah akibat ketimpangan modal penghidupan dan tingginya kerentanan terhadap faktor eksternal masih menjadi permasalahan mendasar di pesisir Karangsong-Indramayu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerentanan nelayan sebagai faktor yang memengaruhi kesejahteraan, mengidentifikasi kondisi modal penghidupan yang dimiliki, serta merumuskan strategi pengembangan penghidupan berkelanjutan di Pesisir Karangsong. Pengumpulan data dilakukan pada Januari 2025 dengan pendekatan Mixed Method, yang menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif melalui pengisian kuesioner, wawancara, serta observasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan beberapa kriteria tertentu, melibatkan 50 responden. Analisis data dilakukan secara deskriptif, baik kuantitatif maupun kualitatif, dengan dukungan skala Likert untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi individu maupun kelompok nelayan. Penelitian ini berfokus pada dua aspek utama, yakni kerentanan dan modal penghidupan. Konteks kerentanan memiliki pengaruh terhadap kehidupan masyarakat, di mana rata-rata tingkat kerentanan nelayan di pesisir Karangsong mencapai 59,96%, yang tergolong signifikan. Sementara itu, modal penghidupan tertinggi ditemukan pada modal fisik dengan persentase 84,96% (kategori sangat baik), tetapi terdapat ketimpangan pada modal manusia yang hanya mencapai 57,85% (kategori cukup). Ketimpangan ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan formal dan terbatasnya pelatihan keahlian, sehingga sebagian besar nelayan masih mengandalkan keterampilan turun-temurun tanpa inovasi yang signifikan. Hal ini berdampak pada keterbatasan adaptasi terhadap teknologi serta diversifikasi usaha. Oleh karena itu, strategi utama yang diusulkan untuk mengatasi tantangan tersebut adalah diversifikasi usaha dan peningkatan program pelatihan, dengan fokus pada optimalisasi sumber daya alam, seperti pengembangan ekowisata mangrove.

Kata Kunci: Karangsong, konteks kerentanan; modal penghidupan; nelayan; penghidupan berkelanjutan

ABSTRACT

The persistent low welfare of gillnet fishers in Karangsong, Indramayu, is closely linked to unequal access to livelihood assets and heightened vulnerability to external factors. This study examines fisher vulnerability as a determinant of welfare, assesses the current condition of livelihood assets, and proposes strategies for sustainable livelihood development. Data were collected in January 2025 using a mixed-methods approach, combining questionnaires, interviews, and observations. A purposive sampling method was applied to select 50 respondents. Descriptive analyses, supported by Likert scale measurements, were used to interpret both qualitative and quantitative data. Results indicate a moderate-to-high level of vulnerability (average score: 59.96%), which significantly influences livelihood stability. Physical capital was the strongest asset (84.96%, "very good"), while human capital was weakest (57.85%, "fair"), mainly due to low formal education and limited skill training. These gaps restrict fishers' capacity for innovation, technological adaptation, and livelihood diversification. To address these challenges, the study recommends targeted training programmes and business diversification, particularly through the development of mangrove-based ecotourism.

Keywords: Karangsong; vulnerability; livelihood assets; fishermen; sustainable livelihood

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa ijin dan biaya

Hubungan Pembiayaan Berkelanjutan dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan Dalam Pengembangan Wisata Bahari
Relationship Between Sustainable Financing and Stakeholder Engagement in Marine Tourism Development

Embun Prowanta, Indra Siswanti, Mochammad Fahlevi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran pembiayaan berkelanjutan dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam mendorong kinerja ekonomi berkelanjutan; dan meningkatkan kesadaran terhadap dampak lingkungan dalam sektor pariwisata bahari. Penelitian dilakukan pada periode Januari hingga Maret 2024 di tiga destinasi utama di Indonesia: Raja Ampat, Bali, dan Pulau Pulau Komodo dengan pendekatan kuantitatif. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur kepada 167 responden, yang terdiri atas pelaku pariwisata, pembuat kebijakan, komunitas lokal, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan akademisi. Responden dipilih secara purposive sesuai dengan keterlibatan mereka dalam isu pariwisata berkelanjutan. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode Structural Equation Modeling (SEM) untuk menguji hubungan antara variabel kesiapan untuk mendukung, pembiayaan berkelanjutan, kinerja ekonomi, kesadaran dampak lingkungan, dan dukungan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan untuk mendukung berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan berkelanjutan, kinerja ekonomi, dan kesadaran lingkungan. Pembiayaan berkelanjutan lebih kuat memengaruhi kesadaran lingkungan dibandingkan kinerja ekonomi. Sementara itu, kesadaran lingkungan terbukti sebagai faktor utama yang meningkatkan dukungan terhadap kebijakan keberlanjutan. Temuan ini menegaskan bahwa keterlibatan pemangku kepentingan dan mekanisme pembiayaan yang berkelanjutan menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan kebijakan berbasis lingkungan dalam pengembangan pariwisata bahari di wilayah yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi Pulau Komodo Pulau Komodo.

Kata Kunci: pembiayaan berkelanjutan; kinerja ekonomi; kesadaran dampak lingkungan; dukungan kebijakan; pariwisata bahari

ABSTRACT

This study investigates the role of sustainable financing and stakeholder engagement in enhancing sustainable economic performance and raising awareness of environmental impacts within the marine tourism sector. The research was conducted between January and March 2024 across three prominent marine tourism destinations in Indonesia, namely Raja Ampat, Bali, and the Komodo Islands. Employing a quantitative approach, primary data were collected through structured questionnaires administered to 167 purposively selected respondents, including tourism operators, policymakers, local community members, representatives of non-governmental organisations (NGOs), and academics—each selected based on their involvement in sustainable tourism initiatives. Data were analysed using Structural Equation Modeling (SEM) to assess the relationships among key variables: readiness to support, sustainable financing, economic performance, environmental impact awareness, and policy support. The findings indicate that readiness to support exerts a significant positive influence on sustainable financing, economic performance, and environmental awareness. Moreover, sustainable financing has a stronger effect on raising environmental awareness than on enhancing economic performance. Environmental awareness, in turn, emerged as a critical determinant of support for sustainability-oriented policies. These results highlight that stakeholder engagement, together with well-structured sustainable financing mechanisms, forms a foundational basis for long-term economic development and environmentally responsible policymaking in marine tourism, particularly in biodiversity-rich areas such as the Komodo Islands.

Keywords: sustainable finance; economic performance; environmental impact awareness; policy support; marine tourism

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa ijin dan biaya

Determinan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Nelayan di Desa Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Kakap

Determinant of Food Security Fishing Household in Sungai Kakap Village, District of Sungai Kakap

Santa Veronika, Eva Dolorosa, Imelda Imelda

ABSTRAK

Rumah tangga nelayan di wilayah pesisir sangat bergantung pada hasil tangkapan ikan yang rentan terhadap produktivitas rendah dan fluktuasi harga. Kondisi ini menjadikan mereka kelompok yang rentan terhadap kerawanan pangan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat ketahanan pangan dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhinya pada rumah tangga nelayan di Desa Sungai Kakap. Data diperoleh dari 90 rumah tangga melalui wawancara dan observasi, kemudian dianalisis menggunakan model ordinal logit. Penilaian ketahanan pangan didasarkan pada dua indikator utama, yaitu proporsi pengeluaran untuk pangan dan tingkat kecukupan energi (TKE). Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata 62% pendapatan rumah tangga dialokasikan untuk konsumsi pangan, sedangkan pengeluaran non-pangan sebesar 38%. Rata-rata asupan energi per individu hanya mencapai 1.255 kkal/hari (60% dari kebutuhan), sementara asupan protein sudah mencukupi sebesar 59,82 gram. Ketidakseimbangan ini menunjukkan adanya kekurangan energi yang signifikan dan menggambarkan kondisi gizi yang perlu mendapat perhatian. Sebagian besar rumah tangga dikategorikan rawan pangan karena tingginya proporsi pengeluaran pangan ($\geq 60\%$) dan rendahnya asupan energi ($\leq 80\%$). Faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap ketahanan pangan adalah pengeluaran rumah tangga ($P = 0,095$), harga beras ($P = 0,079$), harga tempe ($P = 0,031$), dan akses kredit ($P = 0,032$). Temuan ini menegaskan pentingnya kebijakan yang mendukung penguatan ekonomi rumah tangga nelayan melalui diversifikasi pendapatan, stabilisasi harga pangan, perluasan akses kredit disertai edukasi keuangan, serta intervensi gizi yang menekankan kecukupan energi dan konsumsi pangan seimbang.

Kata Kunci: tren penelitian; konservasi; laut; manajemen; masyarakat

ABSTRACT

The primary revenue source for coastal fishing households is derived from fish catches, which are subject to limitations such as diminished productivity and volatile fish prices. The objective of this study was to evaluate the level of food security and to analyse its determinants in fisher households in Sungai Kakap Village. Information was collected from 90 fishing households through interviews and observations, then analysed using a special model. This study used two different ways of classifying people's spending habits. It looked at how much money people spent on food and how much energy they had each day. The results showed that the largest part of household income (62%) was spent on food, while non-food spending made up 38% of household expenditure. On average, fishing households only get 60% of the energy they need from food, which is about 1,255 kcal per day, and they only eat 59.82 grams of protein. Even though they are getting enough protein, they are having many energy problems, so we need to look at the nutritional situation of the fishing households in Sungai Kakap Village. The way fishing households in Sungai Kakap are fed is similar to how food insecurity is defined, because they spend more than 60% of their income on food and don't get enough energy from their food (less than 80%). The main determinants of food security in this study were household expenditure ($P = 0.095$), rice price ($P = 0.079$), tempeh price ($P = 0.031$), and access to credit ($P = 0.032$). These findings highlight that improving food security must be supported by strengthening the economic capacity of fishing households through livelihood diversification, stabilization of staple food prices, expanded access to credit accompanied by financial education, and nutritional interventions focusing on energy adequacy and balanced dietary intake to ensure sustainable food security in coastal communities.

Keywords: food security; food expenditure; fisher households; energy adequacy level



BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN

GEDUNG BPPSDM KP 2 Lt. 2

JALAN PASIR PUTIH NOMOR I ANCOL TIMUR, JAKARTA UTARA

TELP .: (021) 6471 1583 FAX.: 64700924

AMAN: <https://kkp.go.id/brsdm/sosek> E-MAIL: marina.asek@gmail.com

